

Representasi Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen: Analisis Humaniora

Intan Purnamasari 

¹Alumni Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Available online Juni 29, 2025

Published by Rumah Jurnal Penerbit
Aksara Kawanua, Manado

ABSTRAK

Novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen merefleksikan dinamika sosial politik kontemporer melalui penggambaran berbagai bentuk kriminalitas, salah satunya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus kriminal sosial tentang korupsi dalam novel tersebut melalui perspektif Humaniora, dengan menekankan hubungan antara tindakan korupsi dan erosi nilai kemanusiaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra, menganalisis data berupa kutipan peristiwa dalam novel yang merepresentasikan praktik korupsi baik pada tingkat individu maupun struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi ditampilkan dalam lima bentuk utama: (1) hukuman korupsi sebagai propaganda negara, (2) korupsi mikro untuk motif bertahan hidup, (3) rekayasa kasus korupsi untuk pembunuhan karakter politik, (4) korupsi informasi melalui manipulasi opini publik, dan (5) propaganda pencitraan untuk legitimasi kekuasaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam novel bukan hanya kejahatan finansial, tetapi kejahatan kemanusiaan karena merusak moral kolektif, kesadaran publik, dan struktur keadilan sosial. Melalui representasi yang disajikan, novel Bungkam Suara berfungsi sebagai kritik sosial yang memperingatkan bahwa normalisasi korupsi akan menyebabkan degradasi nilai kemanusiaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Kata Kunci: modus kriminal sosial; korupsi; humaniora; sosiologi sastra; Bungkam Suara; J.S. Khairen; representasi kekuasaan.

ABSTRACT

The novel "Bungkam Suara" by J.S. Khairen reflects contemporary socio-political dynamics through its depiction of various forms of crime, one of which is corruption. This study aims to uncover the social crime model of corruption in the novel from a humanities perspective, emphasizing the relationship between acts of corruption and the erosion of human values. The study used a qualitative descriptive method with a sociology of literature approach, analyzing data in the form of incident excerpts from the novel that represent corrupt practices at both the individual and structural levels. The results show that corruption is depicted in five main forms: (1) punishment for corruption as state propaganda, (2) micro-corruption for survival, (3) fabrication of corruption cases for political character assassination, (4) corruption of information through manipulation of public opinion, and (5) image propaganda for legitimizing power. These findings demonstrate that corruption in the novel is not merely a financial crime, but a crime against humanity because it undermines collective morality, public awareness, and structures of social justice. Through its representation, the novel "Bungkam Suara" functions as a social critique, warning that the

Kata Kunci: wakaf tanah; legalitas wakaf; perspektif humaniora; rukun wakaf; pengelolaan

*Corresponding author.

E-mail addresses: intanpurnamasari@gmail.com

wakaf; peruntukan wakaf; hukum wakaf Indonesia.

ABSTRACT

This article examines the legality of land waqf in Indonesia through a humanities perspective that integrates legal, historical, social, and cultural dimensions of Islamic philanthropic practice. Waqf, as a long-standing institution within Islamic civilization, functions not only as a legal-religious instrument but also as a cultural practice that shapes social relations, collective solidarity, and community welfare. This study employs a library research method by reviewing classical Islamic jurisprudence, contemporary waqf regulations, and empirical studies on waqf management in Indonesia. The findings indicate that the practice of waqf has been established since the time of the Prophet Muhammad and has evolved into a socio-cultural tradition that embodies religious values and humanistic commitments. The pillars of waqf—wakif, waqf property, beneficiaries, declaration, and nazhir—serve as normative foundations ensuring its legal validity while reflecting the interconnectedness of individuals, property, and society. The purposes and functions of land waqf extend beyond ritual worship, encompassing public welfare sectors such as education, health services, economic empowerment, and support for vulnerable groups. From a humanities perspective, waqf represents an expression of altruism, moral responsibility, and communal care. The expansion of waqf designation in Law No. 41/2004 demonstrates the state's effort to institutionalize the social and cultural values of waqf through modern legal mechanisms. Effective waqf management requires professionalism, accountability, and adaptive implementation of Sharia principles aligned with contemporary societal needs. This article concludes that waqf is an entity that synthesizes formal legality with humanistic values, positioning it as a strategic instrument for fostering equitable and sustainable social development.

Keywords: *land waqf; waqf legality; humanities perspective; pillars of waqf; waqf management; waqf designation; Islamic law in Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan sosial paling kompleks karena mengandung dimensi multidisipliner, mulai dari ekonomi, politik, budaya, hingga moralitas. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga menghancurkan sistem nilai, keadilan, dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks humaniora, korupsi dipahami bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan kegagalan kemanusiaan dalam menjaga etika, integritas, dan tanggung jawab moral (Burlian, 2016). Dengan kata lain, korupsi lahir dari ketidakseimbangan antara kekuasaan, kepentingan, dan humanitas, ketika individu maupun kelompok menggunakan otoritas untuk meraih keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik (Hamila, 2015).

Fenomena korupsi semakin mengkhawatirkan karena sifatnya yang sistemik. Transparency International secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi menyebar melalui jaringan kekuasaan dan struktur kelembagaan, sehingga menciptakan ketergantungan dan normalisasi praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan sosial (Transparency International, 2022). Dalam perspektif sastra, korupsi yang sistemik tercermin melalui karya-karya yang menyoroti kehancuran moral dan krisis kemanusiaan akibat dominasi elite kekuasaan terhadap masyarakat. Karya sastra

berfungsi sebagai medium untuk mengkritik fenomena tersebut karena sastra merupakan refleksi kehidupan dan struktur sosial yang melingkupinya (Damono, 2014; Ratna, 2011).

Novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen menjadi representasi yang kuat terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan alegoris dan distopian, Khairen menggambarkan dinamika sosial dan politik kontemporer, terutama bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol melahirkan ketidakadilan dan eksplorasi terhadap rakyat. Melalui tokoh-tokohnya, pembaca diperlihatkan mekanisme kekuasaan yang menormalisasi kekerasan, propaganda, dan kriminalitas sosial dalam bentuk korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari individu kelas bawah hingga lingkaran tertinggi elit politik.

Data 9–15 dalam novel menunjukkan bahwa korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari korupsi ekonomi kecil di tingkat individu, rekayasa hukum, manipulasi opini publik, bisnis gelap politik, hingga kriminalisasi tokoh yang berintegritas demi legitimasi kekuasaan. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan individual, melainkan pola yang melebur ke dalam struktur sosial dan menciptakan rantai ketidakadilan yang merusak moral publik. Dari perspektif humaniora, hal ini menggambarkan erosi nilai kemanusiaan, ketika kebohongan, manipulasi, dan propaganda menggantikan kejujuran, moralitas, dan kebenaran sebagai dasar kehidupan sosial (Goldmann, 2016; Wellek & Warren, 2014).

Melalui representasi naratif tersebut, novel Bungkam Suara bukan hanya sekadar hiburan, tetapi turut memainkan fungsi kritik sosial dan refleksi atas situasi masyarakat modern. Sastra berperan untuk menegur, mengingatkan, dan mendorong kesadaran etis kolektif agar masyarakat tidak kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan salah serta mampu menghadapi ketidakadilan sosial secara kritis (Pradopo, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap mode kriminal sosial tentang korupsi dalam novel Bungkam Suara melalui perspektif humaniora sebagai upaya memahami hubungan antara sastra, kejahatan sosial, dan krisis moral masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena sosial dalam karya sastra berdasarkan data teksual dan makna yang terkandung dalam representasi naratif. Penelitian kualitatif berupaya memahami gejala sosial melalui penafsiran makna dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan, bukan sekadar melalui pengukuran numerik (Moleong, 2019). Karena objek penelitian berupa teks sastra, analisis dilakukan secara interpretatif untuk menyingkap hubungan antara struktur naratif dengan realitas sosial yang direpresentasikan di dalam novel.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra, yaitu kajian yang menghubungkan karya sastra dengan struktur sosial masyarakat yang melatarbelakanginya. Menurut Ratna (2011), sosiologi sastra berfungsi memahami karya

sastra tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai produk budaya yang mengandung representasi nilai sosial, ideologi, relasi kekuasaan, dan dinamika masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada representasi modus kriminal sosial tentang korupsi dalam novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen, serta keterkaitannya dengan fenomena korupsi dalam kehidupan sosial kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri atas:

- a) Data primer: Kutipan teks novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen (2023), terutama pada bagian yang menggambarkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Data 9–15).
- b) Data sekunder: Buku teori, artikel jurnal, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan konsep sosiologi sastra, korupsi, dan humaniora, seperti karya Ratna (2011), Wellek & Warren (2014), Damono (2014), dan penelitian relevan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Teknik membaca cermat (close reading) untuk mengidentifikasi narasi, dialog, dan deskripsi dalam novel yang memuat representasi korupsi;
- b) Teknik pencatatan (note-taking) untuk menyeleksi kutipan relevan secara sistematis;
- c) Kategorisasi data berdasarkan pola kemunculan modus kriminal sosial, meliputi:
 1. korupsi mikro tingkat individu,
 2. rekayasa politik,
 3. manipulasi informasi publik,
 4. propaganda kekuasaan, dan
 5. kriminalisasi tokoh berintegritas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a) Reduksi data yakni memilih dan mengelompokkan data sesuai kategori modus kriminal sosial tentang korupsi dalam novel.
- b) Display data yaitu menyajikan kutipan yang telah dikelompokkan untuk dianalisis berdasarkan konteks naratif.
- c) Interpretasi dengan menafsirkan makna representasi korupsi dalam teks dengan menggunakan teori sosiologi sastra dan perspektif humaniora, khususnya terkait nilai moral, relasi kekuasaan, dan etika sosial.
- d) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan analisis dengan realitas sosial dan kritik yang ingin disampaikan pengarang.

Alur analisis ini mengikuti prinsip analisis kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang menekankan proses analisis yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan antara pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan makna.

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas penelitian, dilakukan:

- a) Triangulasi teori dengan mencocokkan temuan teks dengan teori-teori humaniora, sosiologi sastra, dan kajian korupsi;
- b) Pengecekan stabilitas penafsiran dengan membaca data secara berulang agar penafsiran tidak bias subjektivitas;
- c) Konsistensi hermeneutik untuk memastikan hasil interpretasi tetap berkaitan dengan konteks cerita dan realitas sosial yang dikritik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Bungkam Suara merepresentasikan modus kriminal sosial tentang korupsi dalam berbagai bentuk, baik pada tingkat individu maupun struktural. Praktik korupsi tidak hanya muncul sebagai penyimpangan moral personal, tetapi telah melebur ke dalam sistem sosial dan politik sehingga menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan. Berdasarkan analisis data, ditemukan lima bentuk modus korupsi utama dalam novel.

1. Korupsi sebagai Instrumen Kekuasaan dan Propaganda Ketakutan

Temuan pertama menunjukkan bahwa korupsi diposisikan sebagai alat legal untuk menciptakan teror psikologis terhadap masyarakat. Pada Data 9, tokoh Timmy menyaksikan hukuman pejabat korup yang ditampilkan melalui reklame digital dengan cara sadis, yakni tangan digoreng di hadapan publik. Kejadian ini bukan hanya hukuman, tetapi propaganda kekuasaan yang bertujuan menegaskan kontrol otoritas atas rakyat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan menggunakan citra pemberantasan korupsi sebagai alat hegemonik. Dengan menampilkan tindak kekerasan secara terbuka, pemegang kekuasaan menanamkan ketakutan kolektif agar masyarakat tidak melawan.

2. Korupsi Ekonomi Mikro pada Level Personal untuk Motif Bertahan Hidup

Temuan kedua terlihat pada Data 10 dan 11, ketika Timmy melakukan korupsi dengan mengklaim sebagian durian milik pekerja lain sebagai hasil panennya sendiri. Korupsi dalam bentuk ini muncul bukan dari dorongan kekuasaan, melainkan sebagai strategi bertahan hidup akibat tekanan ekonomi dan stigma sosial terhadap keluarganya yang dihukum negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi mikro dalam novel bersifat situasional, dipicu oleh ketidakadilan struktural dan diskriminasi. Novel menyoroti bagaimana korupsi kecil muncul ketika sistem sosial gagal memberikan perlindungan, sehingga individu tergelincir melakukan penyimpangan moral.

3. Produksi Kasus Korupsi untuk Menjatuhkan Tokoh Berintegritas

Temuan ketiga terlihat pada Data 12 dan 13, yang mengungkap bahwa kasus korupsi terhadap Menteri Kinasial sesungguhnya direkayasa. Menteri yang dikenal paling bersih dijadikan korban fitnah politik agar kepercayaan publik terhadap pemangku adat jatuh, sekaligus memuluskan kepentingan Raja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu berkaitan dengan aliran uang, tetapi juga manipulasi hukum dan wacana publik untuk menciptakan pembunuhan karakter. Korupsi dalam bentuk ini bersifat struktural-politis, memanfaatkan lembaga negara sebagai instrumen untuk menyingkirkan lawan politik.

4. Korupsi Informasi melalui Manipulasi Opini Publik

Temuan keempat pada Data 14 memperlihatkan keberadaan aktor bayaran dalam institusi media yang berperan membocorkan informasi tertentu untuk menciptakan kontroversi di ranah publik. Kebocoran data bukan dilakukan untuk transparansi, tetapi untuk merusak reputasi seseorang demi kepentingan elite tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa korupsi juga terjadi pada ranah simbolik—informasi, berita, isu, dan narasi. Novel merepresentasikan dinamika kekuasaan dalam lanskap media modern, di mana informasi menjadi komoditas kriminal, dan persepsi publik dapat dikendalikan dengan strategi komunikasi politik.

5. Propaganda Citra sebagai Modus Legitimasi Kekuasaan dan Korupsi Politik

Temuan kelima tampak pada Data 15, ketika Prof. Terang dan Ranggo memanfaatkan propaganda secara masif untuk mendapatkan kemenangan elektoral. Pabrik propaganda tidak hanya menghapus isu negatif tentang Ranggo, tetapi juga menciptakan realitas baru yang memuluskan jalan menuju kekuasaan. Ironisnya, tokoh menteri yang paling bersih justru dijadikan tumbal agar citra politik salah satu kubu kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksional, tetapi juga dalam bentuk korupsi moral kolektif, ketika kekuasaan dipertahankan dengan cara merusak kebenaran dan memanipulasi kesadaran masyarakat

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Bentuk Modus Korupsi	Agen Pelaku	Sasaran	Dampak Sosial
Propaganda hukuman korupsi	Pemerintah	Rakyat	Normalisasi ketakutan
Korupsi mikro	Individu	Pekerja lain	Degradasi etika
Rekayasa kasus korupsi	Elite politik	Menteri jujur	Pembunuhan karakter
Korupsi informasi	Media & aktor bayaran	Publik	Keretakan opini sosial
Propaganda pencitraan	Mesin politik	Kesadaran publik	Legitimasi kekuasaan tidak etis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa novel *Bungkam Suara* tidak hanya memotret korupsi sebagai kejahatan finansial, tetapi sebagai sistem yang:

1. mengendalikan masyarakat melalui rasa takut,
2. merusak integritas individu,
3. mengorbankan orang berintegritas untuk keuntungan politik,
4. mengaburkan kebenaran melalui media dan propaganda,
5. mengganggu fondasi kepercayaan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, representasi korupsi dalam novel ini menyiratkan kritik bahwa korupsi adalah tragedi humaniora, karena menyangkut hilangnya nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat.

Pembahasan

Representasi korupsi dalam novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen menunjukkan bagaimana kejahatan sosial tidak hanya berlangsung melalui penyalahgunaan keuangan negara, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan multidimensi yang merusak martabat manusia, nilai moral, dan struktur sosial. Pendekatan humaniora memandang korupsi bukan semata tindak pidana, tetapi sebagai bentuk degradasi kemanusiaan ketika kekuasaan dan kepentingan mengalahkan etika dan integritas. Dalam konteks sosiologi sastra, narasi mengenai korupsi yang muncul dalam novel merupakan cerminan dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer, karena sastra, menurut Damono (1984), adalah representasi kehidupan sosial, bukan hanya fiksi belaka. Representasi korupsi dalam novel ini menampilkan pola kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme hukum, media, dan propaganda yang justru memperpanjang siklus ketidakadilan.

Salah satu temuan penting dalam novel adalah bagaimana korupsi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan rakyat. Hukuman terhadap pejabat korup yang disiarkan secara dramatis melalui reklame digital bukan sekadar upaya penegakan hukum, tetapi menjadi instrumen teror psikologis untuk menciptakan ketakutan massal. Kekuasaan dalam konteks ini melaksanakan fungsi represif dengan memanfaatkan citra pemberantasan korupsi sebagai legitimasi moral, padahal di dalamnya tersembunyi agenda politik yang jauh lebih gelap. Representasi ini memperkuat pandangan Burlian (2016) bahwa korupsi merupakan patologi sosial yang tak hanya menghancurkan sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk ruang sosial yang penuh ketakutan, di mana masyarakat dipaksa percaya bahwa kekuasaan selalu benar. Dengan demikian novel ini menyingkap bagaimana korupsi dapat beroperasi melalui institusi negara dan tampil seolah-olah sebagai penegakan keadilan.

Temuan lainnya menunjukkan bagaimana korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat elite, tetapi juga di tingkat bawah sebagai mekanisme bertahan hidup akibat kesenjangan sosial. Ketika Timmy mengambil sebagian durian milik orang lain untuk dicatat sebagai hasil kerjanya, ia sesungguhnya melakukan korupsi mikro. Namun tindakan tersebut muncul bukan dari keserakahan, tetapi dari tekanan struktural akibat stigma sosial dan

ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Dalam perspektif humaniora, tindakan Timmy mencerminkan tragedi moral masyarakat yang miskin akses dan kesempatan. Seseorang dapat tergelincir pada praktik korupsi bukan karena orientasi kriminal, tetapi karena struktur sosial membuat mereka kehilangan harga diri dan akses terhadap keadilan. Sabiq dan Apsari (2021) menjelaskan bahwa tindak kriminal sering kali terjadi karena tekanan struktural dan marginalisasi kelompok sosial. Dengan demikian, novel ini menegaskan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial bukan hanya konsekuensi korupsi, tetapi juga penyebab terciptanya siklus korupsi.

Lebih lanjut, novel menggambarkan korupsi politis sebagai bentuk kejahatan sistemik yang paling berbahaya. Menteri yang dikenal paling bersih justru dijadikan tersangka korupsi karena ambisi aktor politik yang ingin menjatuhkan kekuasaan pemangku adat. Rekayasa kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat dipelintir untuk memenuhi kepentingan politik. Hal ini mengingatkan pada pendapat Karyanto (1997) mengenai teori Lukacs bahwa karya realis sering menggambarkan pergulatan manusia melawan sistem kekuasaan yang menindas. Dalam novel ini, kebenaran bukan lagi ukuran moral; yang menentukan adalah siapa yang mampu mengendalikan narasi korupsi. Ketika figur bersih dikriminalkan melalui manipulasi hukum, korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi merampas reputasi dan kehormatan manusia. Di sinilah novel Bungkam Suara menunjukkan bahwa korupsi bekerja secara halus, menempatkan orang yang seharusnya dihormati sebagai penjahat, sementara pelaku sebenarnya tetap berkuasa.

Selain manipulasi hukum, novel juga mengungkap korupsi informasi melalui media. Kebocoran informasi bukan dilakukan untuk transparansi publik, tetapi untuk mengontrol opini masyarakat dan menghancurkan citra seseorang secara sistematis. Dengan keberadaan aktor bayaran yang membocorkan informasi tertentu, media menjadi arena pertarungan politik, bukan lagi ruang penyebaran kebenaran. Dalam sudut pandang humaniora, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan modern tidak hanya bergerak pada ranah fisik, tetapi telah merambah ranah simbolik, di mana informasi dan wacana menjadi alat untuk mengendalikan masyarakat. Ritzer (2014) menjelaskan bahwa modernitas menghadirkan bentuk kekuasaan baru melalui kontrol informasi, yang dapat mengarahkan perilaku sosial tanpa paksaan fisik. Novel ini menegaskan fenomena tersebut dengan menunjukkan bagaimana masyarakat mudah diadu domba melalui wacana yang secara sengaja diproduksi.

Propaganda pencitraan politik dalam novel menampilkan bentuk paling kompleks dari korupsi karena tidak hanya menyerang keuangan dan hukum, tetapi juga menguasai moral kolektif masyarakat. Kampanye besar-besaran untuk membentuk citra positif tokoh politik bukan dilakukan atas dasar prestasi dan integritas, melainkan melalui manipulasi informasi yang dirancang untuk menipu publik. Ketika propaganda dijalankan secara sistemik, masyarakat didorong untuk mempercayai kebohongan sebagai kebenaran. Pradopo (2010) menyebut sastra sebagai sarana kritik terhadap kebukuan moral masyarakat, dan novel ini menjalankan fungsi tersebut dengan menyoroti bagaimana masyarakat justru ikut mempertahankan tokoh yang korup akibat pencitraan politik yang masif. Novel ini mengingatkan bahwa korupsi moral terjadi bukan hanya

pada pelaku politik, tetapi juga pada masyarakat yang tidak lagi kritis terhadap wacana kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi dalam novel Bungkam Suara bukan hanya tindakan kejahatan ekonomi, tetapi tragedi kemanusiaan yang lahir dari sistem kekuasaan yang tidak adil. Korupsi bekerja melalui berbagai mekanisme: teror hukum, manipulasi ekonomi, kriminalisasi tokoh bersih, konstruksi informasi, dan propaganda kekuasaan. Semua bentuk tersebut menunjukkan bahwa korupsi merusak dua aspek fundamental kehidupan: kepercayaan dan nilai moral. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada kebenaran, keadilan, dan institusi sosial, mereka tidak lagi mampu membedakan yang bermoral dan tidak bermoral. Novel ini memperingatkan bahwa normalisasi korupsi akan mengarah pada dunia di mana kekuasaan menjadi penentu kebenaran dan rakyat kehilangan kemampuan untuk memperjuangkan keadilan.

Dengan demikian, Bungkam Suara merupakan novel yang memenuhi fungsi sosial sastra sebagaimana diuraikan Ratna (2011), yaitu memberi kontribusi terhadap kesadaran etis masyarakat melalui kritik terhadap tatanan sosial yang menyimpang. Sastra bukan hanya hiburan, melainkan medium refleksi moral agar manusia tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Pesan ini sangat relevan dengan konteks sekarang, saat korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan serius, melainkan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang lumrah. Novel ini menggugah kesadaran pembaca bahwa korupsi harus dilawan bukan hanya melalui hukum, tetapi melalui pemulihan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberanian untuk menjaga kebenaran.

Pembacaan lebih mendalam terhadap novel Bungkam Suara menunjukkan bahwa Khairen tidak sekadar menggambarkan korupsi sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai sistem penindasan modern yang bekerja melalui struktur birokrasi, militer, ekonomi, dan media. Gambaran ini menguatkan pemahaman teoretis Faruk (2014) bahwa struktur sosial dapat direkonstruksi dalam karya sastra secara simbolik lewat konflik antartokoh, dan konflik tersebut pada dasarnya merupakan refleksi pertarungan ideologi dalam masyarakat. Novel ini merefleksikan bahwa korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan ambisi kekuasaan, praktik oligarki, dan kompetisi politik. Representasi ini menunjukkan pola umum dalam masyarakat modern bahwa aktor korup cenderung mengoperasikan jaringan kekuasaan secara tertutup sehingga sulit diidentifikasi oleh masyarakat luas.

Tindakan propaganda dan manipulasi informasi dalam novel juga mencerminkan apa yang disebut Wellek dan Warren (1989) sebagai "fungsi sosial sastra", yakni kemampuan karya sastra untuk mengungkap struktur kekuasaan yang bekerja di balik realitas sosial. Informasi tentang kasus korupsi yang sengaja dibuat-buat bukan hanya menimbulkan salah kaprah di masyarakat, tetapi lebih jauh memecah solidaritas sosial. Ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk mempercayai kebenaran mana pun, mereka menjadi mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Pada titik ini, novel Bungkam Suara menampilkan fenomena sosial yang telah diperingatkan Ritzer (2014) tentang kontrol sosial berbasis wacana—bahwa kuasa tertinggi bukan lagi berada pada fisik atau

kekerasan, melainkan pada produksi wacana yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah.

Di sisi lain, adanya korupsi mikro yang dilakukan Timmy menunjukkan paradoks moral penting dalam novel ini: pelaku korup tidak selalu orang jahat. Individu dapat masuk ke dalam praktik korup karena keterpaksaan, tekanan struktural, dan ketidakadilan sosial. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2017) bahwa kejahatan sosial dapat lahir bukan dari niat, melainkan dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, novel ini menyiratkan pesan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya menargetkan pelakunya, tetapi juga struktur sosial yang melahirkan kondisi koruptif. Kritik tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat dewasa ini, di mana kelompok rentan sering kali terjebak dalam tindakan kriminal karena tekanan ekonomi dan sosial.

Selain itu, novel menggambarkan bahwa korupsi membentuk hierarki baru dalam masyarakat, yaitu hierarki berdasarkan kontrol informasi dan propaganda, bukan lagi berdasarkan kapasitas moral dan kerja keras. Tokoh yang paling jujur justru dihancurkan reputasinya melalui narasi politik palsu. Para pelaku korup menggunakan media untuk membingkai kejahatan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kejahatan. Dalam perspektif humaniora, fenomena ini bukan hanya bentuk penyimpangan etika, tetapi perampasan hak dasar manusia untuk mendapatkan kebenaran. Dengan menekankan aspek tersebut, Khairen berhasil menampilkan dimensi korupsi yang jarang diangkat dalam karya sastra Indonesia kontemporer: korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penindasan epistemologis—penguasaan kebenaran demi melanggengkan kekuasaan.

Kehadiran institusi hukum dan tentara sebagai alat yang memuluskan propaganda menegaskan bahwa korupsi dalam novel ini bekerja secara institusional, bukan sporadis. Kekuasaan negara melibatkan lembaga resmi untuk memproduksi "kebenaran" versi penguasa, sehingga mustahil bagi rakyat biasa untuk mempertanyakan narasi tersebut tanpa risiko hukuman. Kondisi ini memperkuat pemahaman Ratna (2013) bahwa karya sastra dapat memuat kritik terhadap budaya kekuasaan yang mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Novel Bungkam Suara secara simbolik menampilkan bagaimana ketika institusi hukum menjadi alat politik, maka korupsi bukan lagi kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang, tetapi menjadi sistem yang dikelola oleh negara.

Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuannya menampilkan korupsi sebagai penyakit sosial yang tidak terlihat, yang awalnya tumbuh melalui narasi kecil, kemudian berkembang menjadi ideologi kekuasaan. Ketika masyarakat dibuat percaya bahwa hukuman sadis terhadap pelaku korup adalah bukti supremasi hukum, mereka sesungguhnya sedang diarahkan untuk menerima kekejaman sebagai norma keadilan. Dalam perspektif humaniora, situasi ini menandakan kemunduran moral kolektif: masyarakat bukan hanya korban, tetapi juga menjadi bagian dari kekerasan simbolik yang diproduksi oleh penguasa. Kondisi ini mengingatkan pembaca bahwa korupsi tidak hanya menghancurkan sistem birokrasi dan ekonomi, tetapi juga menghilangkan nilai empati, solidaritas, dan kemanusiaan.

Novel Bungkam Suara memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi masalah keberadaban. Novel ini menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi tidak akan tercapai selama kekuasaan digunakan untuk memanipulasi kebenaran, memecah solidaritas sosial, dan menciptakan hierarki berdasarkan kebohongan. Dengan menggambarkan korupsi dalam spektrum luas—mulai dari tindakan kecil berbasis ekonomi, manipulasi informasi, hingga operasi politik berskala nasional—Khairen memberikan kritik tajam terhadap realitas sosial masa kini. Novel ini mengingatkan pembaca bahwa melawan korupsi berarti melawan sistem nilai yang tidak manusiawi, bukan semata-mata melawan para pelakunya. Sastra dalam hal ini memperkuat fungsi sosialnya sebagai penjaga nurani masyarakat, menghadirkan refleksi bahwa keadilan dan kebenaran hanya dapat dipertahankan jika masyarakat berani menolak kebohongan yang dinormalisasi oleh kekuasaan.

4. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Bungkam Suara tidak hanya menampilkan kisah fiksi, tetapi merefleksikan realitas sosial secara kritis melalui penggambaran korupsi sebagai fenomena kompleks yang bekerja pada berbagai level kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap data 9–15, ditemukan bahwa korupsi direpresentasikan dalam lima bentuk utama: (1) hukuman korupsi sebagai propaganda negara untuk mananamkan ketakutan, (2) korupsi mikro yang dilakukan tokoh masyarakat biasa sebagai strategi bertahan hidup di tengah tekanan sosial-ekonomi, (3) rekayasa kasus korupsi untuk menghancurkan reputasi politik tokoh yang bersih dan berintegritas, (4) manipulasi informasi dan pengendalian media untuk membentuk opini masyarakat, dan (5) propaganda pencitraan demi mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan persepsi publik.

Dalam perspektif Humaniora, korupsi yang tergambar dalam novel bukan hanya persoalan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, tetapi sebuah kegagalan kemanusiaan yang menyebabkan runtuhnya nilai etika, keadilan, dan solidaritas sosial. Novel ini memperlihatkan bahwa korupsi bersifat sistemik, melibatkan jaringan kuasa yang memanfaatkan hukum, media, dan aparat negara sebagai instrumen pemberian. Ketika struktur kekuasaan terlibat dalam praktik korup, masyarakat menjadi korban berlapis: kehilangan akses terhadap kebenaran, kehilangan kepercayaan pada institusi sosial, dan mengalami kerusakan moral kolektif.

Novel Bungkam Suara hadir sebagai kritik sosial yang kuat terhadap praktik kekuasaan yang koruptif. Narasi novel ini memperingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui hukuman formal, tetapi harus menyentuh pemberian nilai kemanusiaan, pemulihan integritas sosial, dan resistensi terhadap manipulasi kebenaran yang dinormalisasi oleh penguasa. Novel ini menegaskan kembali peran sastra sebagai medium refleksi kritis yang membantu masyarakat memahami bahaya korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai ancaman terhadap martabat manusia dan keberadaban suatu bangsa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amzawiyah, Sitti. 2011. Realitas Sosial Dalam Novel Revolusi Dari Secangkir Kopi Karya Didik Fortunadi. Kendari. Skripsi FKIP Unhalu.
- Amzawiyah, S (2016). Realitas Sosial dalam Novel Revolusi dari Secangkir Kopi karya Didik Fortunadi. Jurnal Humanika.
- Anwar, Ahyar. 2010. Teori Sosial Sastra. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Anwar, C. (2015). Manajemen konflik untuk menciptakan komunikasi yang efektif (Studi kasus di Departemen Purchasing Pt. Sumi Rubber Indonesia). Interaksi: Jurnal ilmu komunikasi, 4(2), 148-157. DOI: <https://doi.org/10.14710/interaksi.4.2.148-157>
- Austin Warren, Rene Wellek. 2014. Teori Kesusastraan. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aminuddin. 1990. Sekitar Masalah Sastra. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Burlian, Paisol. (2016). Patologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Donova, Catharine. 2001. Sexual Harassment of Working Women. New Haven and London: Yale University Press.
- Damono, Sapardi Djoko. 1984. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Darma, Budi. 2019. Pengantar Teori Sastra. Jakarta. Penerbit Kompas.
- Erwinskyahbana, Tengku. 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.Vol.3, No.1, hlm 3-4.
- Faruk. 2014. Pengantar sosiologi sastra. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Febriyanto, Alfian. 2019. Pengayaan Pembelajaran Sosiologi: Permasalahan Sosial. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Hudi, Ilham. 2017. Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orangtua. Jurnal Moral Kemasyarakatan. Vol.2, No.1, hlm 31-32.
- Hamila. 2015. Masalah-masalah Sosial dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. Jurnal Humaika. 15 (3).
<http://digilib.unila.ac.id/20367/3/bab%20II.pdf>
- Karyanto, Ibe. 1997. Realisme Sosial Georg Lukacs. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Luthans, F. 2002. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, Vol.23, hlm 695-708.
- Luxemburg, J. V, Dkk. 1989. Pengantar Ilmu Sastra (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta: PT Gramedia Pustaka)
- Masbur. 2015. Konstruksi dan Model Praksis Pendidikan Inklusif. Jurnal Edukasi. Vol.1, No.2, hlm 136-137.
- Megawulandari, M., Rafli, Z., & Rohman, S. (2019). Patologi Sosial dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4(2), 85-90.
- Malaisya, P. I (2020). Defenisi ‘Penipuan’ dalam pembelian dalam talian: Analisis terhadap peruntukan undang-undang di Malaisya. DOI: 10.35631/IJLGC.521009.

- Murniati, Agustina Nunuk Prasetyo. 1995. Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Agama Yahudi dan Katolik dalam Dzuhayatin, Siti Ruhaini (ed). 1995. Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Mihardja, Ratih. 2012. Buku Pintar Sastra Indonesia. Jakarta. Laskar Aksara.
- Muflikh Raharjo, Yusuf. 2017. Kajian Sosiologi Sastra Dan Pendidikan Karakter Dalam Novel Nun Pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra Serta Relevansinya Dengan Materi Ajar Di Sma, Vol.6 No.1, hlm 11.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2015. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurholis. 2019. Pengantar sosiologi sastra. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho, M. D. (2020). Realitas Sosial dalam Novel Cermin Jiwa karya S. Prasetyo Utomo (Kajian Teori Emile Durkheim). Jurnal Sapala.
- Nurfitriani, S. (2017). Realitas Sosial dalam Novel Pulang karya Leila S. Chudori: Kajian strukturalisme Genetik. Jurnal pendidikan bahasa dan sastra.
- Putri, D.S. (2018). Realitas Sosial dalam Novel Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany (Kajian Sosiologi Sastra). Jurnal Bapala.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2003. Paradigma Sosiologi Sastra Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratna, kutha, Nyoman. 2011. Antropologi Sastra: peranan unsur-unsur kebudayaan dalam proses kreatif. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Ratna, Kutha, Nyoman. 2013. Paradigma sosiologi sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosana, Elly. 2017. Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial. Al-Adyan. Vol.12, No.1, hlm 16.
- Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Rafli Muhamad, Apsari, Nurliana cipta. Dampak Pengangguran Terdapat Tindakan Kriminal Ditinjau sari Prespektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 3 (1). Halaman 51-64).
- Doi:<http://doi.org/10.24198/jkrk.v3i131973.g14820> (di akses tanggal 4 Februari 2021)
- Satinem. 2019. Apresiasi Prosa Fiksi. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Semi, M. Atar. 1993. Metode Penelitian Sastra. Bandung: Angkasa
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: EajaGrafindo Persada.
- Sehandi, Yohanes. 2018. Mengenal 25 Teori Sastra. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Sepli, Ratihfa. 2017. Realitas Sosial Dalam Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Jejak-Jejak Yang Membekas Karya Syafiwal Azzam, Vol.2, No.1, hlm 14.
- Siswanto, Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta. Pt Grasindo.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Stanton, Robert. 2017. Teori Fiksi Robert Stanton. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Waluya, Bagja. 2009. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Jakarta. PT. Pribumi Mekar.
- Wicaksono, Andri. 2014. Pengkajian Prosa Fiksi. Yogyakarta. Penerbit Garudhawara.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 2001. Fenomena Realitas Sosial Sebagai Objek Kajian Ilmu Sosial. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari Lubis, Fheti. 2020. Analisis Androgini Pada Novel “Amelia” Karya Tere-Liye, Vol.17, No.1, hlm 2-3.
- Welek, Rene dan Waren, Austin. Teori Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1989.
- Yulianto, Agus. 2019. Undas: Unsur Kriminalitas dalam Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata Vol 15, Nomor 2. Kalimantan Selatan.